

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNAN ANAK KABUPATEN ASAHAN**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. ASAHAN
JALAN MAHONI NO. 1 KISARAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA**



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JALAN MAHONI NO. 1 KISARAN –TELP. (0623) 41474

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN
NOMOR :

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

17. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026.

KESATU : Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN.
2. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V. PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran

Pada tanggal : Juli 2025.

Kepala DP2KBP3A Kabupaten Asahan,



Edi Sukmana, SH, MS.i

Pembina Utama Muda

NIP. 19710405 199703 1 011

Tembusan :

Bupati Asahan sebagai laporan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kahadirat Allah SWT, Atas berkat Rahmatnya sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini menggambarkan perumusan rancangan akhir untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan berdasarkan program dan kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan.

Semoga hasil dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman dalam mengevaluasi kegiatan Tahun Anggaran 2026.

Akhirnya terima kasih kami aturkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi membantu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2026 ini hingga selesai.

Kisaran,

KEPALA DINAS DALDUK, KB, PEMBERDAYAAN
PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ASAHAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB.I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	7
	1.3 Maksud dan Tujuan	9
	1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB.II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	11
	2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	12
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal	13
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	18
BAB. III	TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	19
	3,1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana OPD	19
	3.2 Indikator Kinerja Utama	21
	3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB.IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB.V	PENUTUP	27

BAB. I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good governance and clean government terus berkembang dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efesiensi, efektifitas, dan demokratis.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan menyusun rencana kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan menyusun rencana kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renja tahun 2026 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) . Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2026 dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, meliputi: Program Pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Peningkatan disiplin aparatur, Keluarga berencana, Pembinaan peran serta masyarakat, Pelayanan Konterasepsi, Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Peringatan/Perayaan hari besar Nasional, Keagamaan dan momen khusus tertentu, Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak, Kesehatan Reproduksi Remaja, Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita, Peningkatan Pemenuhan hak Anak..

b. Proses Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan

Proses penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 129 disajikan dengan sistematika :

- a. Pendahuluan
- b. Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
- c. Tujuan dan sasaran perangkat daerah
- d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dan
- e. Penutup.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, orientasi mengenai Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Anggota tim penyusun Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan adalah pejabat dan staf Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

2. Orientasi mengenai Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Orientasi mengenai Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, hubungan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja.

Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

4. Pengumpulan Data dan Informasi.

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :

- a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.
- b. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
- c. Dokumen-dokumen.
- d. Dokumen-dokumen RKPD.
- e. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
- f. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
- g. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
- h. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
- i. Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

c. Keterkaitan antara Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, RKPD dan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 Tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

d. Proses penyusunan RAPBD

Renja-Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja-Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

RenjaDinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan mempunyai fungsi penting, karena RenjaDinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

17. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 25);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai Evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2026 dan Perencanaan Program/ Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026.

Tujuannya adalah untuk memasukkan Program /Kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Asahan adalah sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 dan Capaian Renstra OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB. III Tujuan, Sasaran Program Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial.

BAB. IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB. V Penutup

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. ASAHAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Asahan tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Asahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada **LAMPIRAN**.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan

Kajian terhadap capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan berdasarkan Indikator yang telah ditentukan. Capaian Kinerja dan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Rasio Akseptor KB.
- Menurunkan Total Fertilitas Rata (TFR).
- Menurunnya Jumlah Rata rata Anak per Keluarga.
- Meningkatkan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Pasangan Usia Subur Aktif Ber KB	Tingkat partisipasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk(%)	90	100	111
2	Anak yang lahir dalam keluarga	Rata-rata Jumlah anak per keluarga	2.8	2.35	119
3	BKB, BKR, BKL dan UPPKS	Persentase PPKS kecamatan	90	90	100
4	Jumlah kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender	Persentase Lembaga PUG yang dibentuk	80	97	121
5	Jumlah perempuan yang berpartisipasi pada Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Partisipasi Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan	42.67	43	101

		Ekonomi			
6	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan yang dibina	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dibina	80	92	115
7	Pengaduan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan	Persentase kasus perlindungan perempuan yang ditangani	100	100	100
8	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	75	100	133
9	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas keluarga yang dibina	71	90	127
10	Data Gender dan Anak	Ketersediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Ada data	Ada data	100
11	Lembaga PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Persentase Lembaga PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang dibentuk	90	130	144
12	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas anak yang dibina	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	85	85	100
13	Kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persentase kasus perlindungan kekerasan terhadap anak yang ditangani	100	100	100

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan

Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan tidak terlepas dari isu-isu penting sebagai berikut :

1. Tingkat TFR belum mendukung terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS).
2. Unmet- Need sasaran Program KB masih tinggi.
3. Mekanisme Operasional lini lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan.
4. Masih rendahnya Peserta KB Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP).

5. Prilaku kehidupan Remaja yang sudah sangat rawan terhadap Resiko Triad KRR-Konseling Reproduksi Remaja (Seksualitas, HIV/AIDS dan Narkoba).
6. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
7. Kurang berkembangnya kelompok bina-bina keluarga.
8. Tingginya Drop out Peserta KB.
9. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) banyak yang tidak berkembang karena belum mendapatkan bantuan permodalan.
10. Belum Optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan.

Berdasarkan isu-isu penting diatas Permasalahan yang masih dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Petugas Lapangan KB (PLKB)/Penyuluh KB (PKB) tidak seimbang dengan jumlah Desa.
2. Kecenderungan Kasus Seks Pranikah dan Kasus Kesehatan Reproduksi Remaja terus meningkat.
3. Kegiatan Lomba Ketahanan Keluarga tidak ada dana untuk hadiah dan Operasional Pembinaan karena sebagai perangsang bagi Kelompok. Bina Keluarga.
4. Karena tidak ada dana Stimulan untuk kelompok sedangkan hal tersebut sangat diperlukan untuk pengembangan Kelompok.
5. Masih tingginya Peserta KB yang memakai alat Kontrasepsi Harmonal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam keberhasilan yang telah dicapai untuk kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Asahan Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Asahan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Asahan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU MENURUT	REALISASI	%
1	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<u>115,030,763.00</u>	<u>114,331,063.00</u>	99.39

	Kegiatan :			
	PELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	<u>30,000,000.00</u>	<u>29,300,300.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30,000,000.00	29,300,300.00	97.67
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	<u>85,030,763.00</u>	<u>85,030,763.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi	85,030,763.00	85,030,763.00	100.00
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<u>173,644,000.00</u>	<u>172,183,796.00</u>	99.16
	Kegiatan :			
	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	<u>85,244,000.00</u>	<u>84,787,500.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	85,244,000.00	84,787,500.00	99.46
	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	<u>88,400,000.00</u>	<u>87,396,296.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	88,400,000.00	87,396,296.00	98.86
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<u>409,999,513.00</u>	<u>404,442,987.00</u>	98.64
	Kegiatan :			
	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	<u>149,999,938.00</u>	<u>145,236,312.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			

	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	149,999,938.00	145,236,312.00	96.82
	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	<u>259,999,575.00</u>	<u>259,206,675.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	219,999,900.00	219,993,600.00	100.00
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39,999,675.00	39,213,075.00	98.03
4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<u>346,356,000.00</u>	<u>333,440,000.00</u>	96.27
	Kegiatan :			
	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	<u>130,000,000.00</u>	<u>130,000,000.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	130,000,000.00	130,000,000.00	100.00
	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	<u>216,356,000.00</u>	<u>203,440,000.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	216,356,000.00	203,440,000.00	94.03
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<u>6,137,787,011.00</u>	<u>6,081,558,374.00</u>	<u>99.08</u>
	Kegiatan :			
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	<u>20,136,350.00</u>	<u>20,136,350.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,136,350.00	20,136,350.00	100.00
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	<u>4,966,395,337.00</u>	<u>4,914,723,696.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,966,395,337.00	4,914,723,696.00	98.96

	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	<u>358,499,750.00</u>	<u>358,015,208.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33,500,000.00	33,470,000.00	99.91
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,999,950.00	29,999,950.00	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000.00	9,680,000.00	96.80
	Penyediaan Bahan/Material	44,999,800.00	44,999,800.00	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180,000,000.00	179,865,458.00	99.93
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	<u>158,625,800.00</u>	<u>158,164,900.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158,625,800.00	158,164,900.00	99.71
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<u>440,577,774.00</u>	<u>437,880,776.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89,999,874.00	87,340,576.00	97.05
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	340,577,900.00	340,540,200.00	99.99
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<u>193,552,000.00</u>	<u>192,637,444.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163,556,600.00	163,377,444.00	99.89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29,995,400.00	29,260,000.00	97.55
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<u>377,216,800.00</u>	<u>370,190,450.00</u>	98.14
	Kegiatan :			
	PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	<u>15,000,000.00</u>	<u>14,879,100.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	15,000,000.00	14,879,100.00	99.19

	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<u>362,216,800.00</u>	<u>355,311,350.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	9,999,950.00	8,661,550.00	86.62
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	352,216,850.00	346,649,800.00	98.42
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<u>11,139,592,743.00</u>	<u>10,942,632,243.00</u>	98.23
	Kegiatan :			
	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	<u>9,770,338,200.00</u>	<u>9,693,758,900.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Pengendalian Program KKBPK	196,394,200.00	196,393,000.00	100.00
	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	9,473,944,000.00	9,397,365,900.00	99.19
	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	<u>1,064,974,000.00</u>	<u>944,594,000.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1,029,974,000.00	909,616,000.00	88.31
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	35,000,000.00	34,978,000.00	99.94
	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	<u>274,280,543.00</u>	<u>274,280,543.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	274,280,543.00	274,280,543.00	100.00
	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	<u>30,000,000.00</u>	<u>29,998,800.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Pembinaan terpadu Kampung KB	30,000,000.00	29,998,800.00	100.00

8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<u>723,251,900.00</u>	<u>717,998,790.00</u>	99.27
	Kegiatan :			
	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	<u>703,252,200.00</u>	<u>697,999,090.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	49,999,550.00	49,999,550.00	100.00
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	19,999,950.00	19,999,950.00	100.00
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	533,252,950.00	529,716,950.00	99.34
	Sosialisasi Ibangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	99,999,750.00	98,282,640.00	98.28
	PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	<u>19,999,700.00</u>	<u>19,999,700.00</u>	
	Sub. Kegiatan :			
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	19,999,700.00	19,999,700.00	100.00
	TOTAL KESELURUHAN	19,422,878,730.00	19,136,777,703.00	98.53

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil monitoring dilapangan, masyarakat menginginkan Penyuluhan KB lebih diperbanyak lagi agar pelaksanaan pelayanan KB terhadap masyarakat lebih masksimal,serta adanya usulan agar dilaksanakan :

- Pembinaan Kelompok BKB lebih ditingkatkan agar para keluarga mempunyai anak balita dapat mengasuh anak balita yang lebih baik.

- b. Pembinaan Kelompok UPPKS agar dilaksanakan dengan baik dan diberi penambahan modal secara bergantian.
- c. Peningkatan dalam Program Kampung KB di Kabupaten Asahan.
- d. Peningkatan Penurunan dan Pencegahan keluarga beresiko Stunting.
- e. Penurunan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Asahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan bagian dari serangkaian reformasi dibidang Pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi dalam rangka mewujudkan Demokrasi, Desentralisasi, Transparan, Akuntabilitas serta penciptaan Pemerintah yang baik dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya Pemberdayaan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang pada hakekatnya Perkembangan Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan antara kuantitas dan Pesebaran Penduduk dengan lingkungan hidup. Adapun Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan kedepan memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan perlindungan terhadap Perempuan dan hak-hak Anak.

Sasaran dan kebijakan strategi program serta kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana dan Perlindungan Perempuan dan Hak-hak Anak telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2021-2026).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan

Visi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai VISI sebagai berikut :

“Mewujudkan Penduduk Tumbuh seimbang dan Keluarga Berkualitas “

Untuk mencapai Visi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.
2. Meningkatkan Ketersediaan Data Informasi Keluarga
3. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan kesertaan dalam program KB dari berbagai sektor	Pasangan Usia Subur Aktif Ber KB	Tingkat partisipasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk(%)
2	Menurunnya rata-rata angka kelahiran	Anak yang lahir dalam keluarga	Rata-rata Jumlah anak per keluarga
3	Meningkatkan persentase jumlah keluarga sejahtera	BKB, BKR, BKL dan UPPKS	Persentase PPKS kecamatan
4	Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG	Jumlah kegiatan pembinaan pengarusutamaan gender	Persentase Lembaga PUG yang dibentuk
5	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Jumlah perempuan yang berpartisipasi pada Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Partisipasi Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
6	Meningkatkan penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan yang dibina	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dibina
7	Meningkatkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Pengaduan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan	Persentase kasus perlindungan perempuan yang ditangani
8	Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat kecamatan
9	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas keluarga yang dibina

10	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Data Gender dan Anak	Ketersediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data
11	Meningkatkan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Lembaga PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Persentase Lembaga PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang dibentuk
12	Mngembangkan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas anak yang dibina	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak yang dibina
13	Meningkatkan kepastian hukum masyarakat dan produk hukum yang memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat	Kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persentase kasus perlindungan kekerasan terhadap anak yang ditangani

3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran serta merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran Pencapaian Program dan kegiatan yang telah ditetapkan komponen yang sangat penting pada saat merencanakan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah berhasil diperoleh selama periode berjalan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Tingkat partisipasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk(%)	80%	85%	90%	100%	100%
Rata-rata Jumlah anak per keluarga	2.9	2.85	2.8	2.75	2.7
Persentase PPKS kecamatan	80%	85%	90%	95%	100%
Persentase Lembaga PUG yang dibentuk	60%	70%	80%	90%	100%

Persentase PartIsipasi Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	41,30%	42%	42,67%	43,67	44,33%
Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dibina	60%	70%	80%	90%	100%
Persentase kasus perlindungan perempuan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	68%	70%	75%	80%	85%
Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas keluarga yang dibina	57%	57%	71%	86%	100%
Ketersediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Ada data	Ada data	Ada data	Ada data	Ada data
Persentase Lembaga PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang dibentuk	80%	85%	90%	95%	100%
Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	65%	85%	85%	100%	100%
Persentase kasus perlindungan kekerasan terhadap anak yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%

3.4 Program dan Kegiatan

Berdasarkan indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan sasaran Pembangunan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah merencanakan Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2025, yaitu :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	135,000,000.00
2	Penyediaan Bahan/Material	3 Paket/keg	50,000,000.00
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	10,000,000.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	30,000,000.00

5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	35,000,000.00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	40,000,000.00
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43 Unit	122,667,450.00
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1,115,399,900.00
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	10,000,000.00
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	137,301,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	49,883,800.00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	40,000,000.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	15,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan / org	4,994,553,341.00
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	48,919,000.00
4	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	30,000,000.00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2 Organisasi	60,000,000.00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000.00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	390,000,000.00
3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39,999,675.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		

1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
2	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	100 orang	210,000,000.00
3	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	7 layanan	233,912,500.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
1	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten kota		
2	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota	7 layanan	53,377,500.00
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten /kota		
4	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ Kota	70 orang	88,400,000.00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	860,700,000.00
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
3	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1 Dokumen	40,000,000.00
4	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	1 Laporan	4,054,255,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
2	Pengendalian Program KKBPK	3 Laporan	330,020,000.00
3	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (DAK Non Fisik BOK KB)	6 Laporan	1,930,955,000.00
4	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi	140,000,000.00
5	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3 Laporan	25,000,000.00
6	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
7	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	39 Laporan	25,000,000.00
8	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
9	Pembinaan Terpadu Kampung KB	4 Laporan	35,000,000.00
10	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	61 Kampung	256,394,200.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		

2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	20,000,000.00
3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	25 Laporan	80,000,000.00
4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	30 Orang	30,000,000.00
5	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	150 Orang	25,000,000.00
6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1733 Orang	1,248,770,000.00
7	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 keg	
8	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	40,000,000.00
	TOTAL		17,110,508,366.00

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Asahan tahun anggaran 2026 dan perkiraan maju rencana tahun 2027 dapat dilihat sebagaimana **terlampir**.

BAB.V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lebih lanjut. Sehingga RKA dan DPA yang disusun benar benar sesuai dengan kebutuhan dilapangn serta dilaksanakan secara berkelanjutan dengan prioritaskan yang sesuai dengan dukungan dana yang tersedia, sehingga Program dan Kegiatan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kisaran,

KEPALA DINAS DALDUK, KB, PEMBERDAYAAN
PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ASAHAN



EDY SUKMANA, SH, MS.i
PEMUDA UTAMA MUDA
NIB 19700713 199512 1 011

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. ASAHAN

TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						20.567.700.000,00							15.060.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.234.403.314,00							13.940.000.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1.095.730.114,00							675.000.000,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	60.920.000,00						-	50.000.000,00	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	60.920.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	60.920.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dibina	-			100 %	217.158.200,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	-			2 keg	145.000.000,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	perempuan	-	75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	perempuan		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		[Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG)]	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	25.10 55.00	23.77 49.76	24.00 50.00	24.10 51.00	217.158.200,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				OPD dan Kecamatan Lembaga	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	perempuan		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten / Kota	-			2 keg	72.158.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	perempuan	-	75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				0 orang	18.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				2 Orang	3.352.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang	3.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				0 orang	42.578.250,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	88.231.164,00			-	-	perempuan	-	90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				15 orang	88.231.164,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	perempuan		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas keluarga yang dibina	-			100 %	80.000.000,00						-	35.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	129.990.000,00			-	-	anak	-	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				1 Kegiatan	129.990.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	anak		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	-	-	-	-	-	363.865.000,00	-	-	-	-	-	-	265.000.000,00	-
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	233.875.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang	57.150.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang	90.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang	15.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</i>				0 Orang	5.437.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</i>				0 Orang	3.287.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				0 Orang	3.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota</i>				0 Orang	60.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</i>	-			1 lembaga	0,00			-	-	anak	-	205.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														
			<i>Jumlah KIE Perlindungan khusus anak</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	anak		160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	anak		45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						17.138.673.200,00							13.265.000.000,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	5.711.259.616,00						-	5.295.000.000,00	
		[Tercapainya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan Daerah]	Persentase Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	80	68	70	72	5.711.259.616,00	-	-	-	-	-	-	5.295.000.000,00	-
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	28.211.056,00			-	-	-	-	95.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	16.249.681,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	11.961.375,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	5.400.938.160,00			-	-	kantor	-	5.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	5.400.938.160,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	kantor		5.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			12 bulan	50.000.000,00			-	-	kantor	-	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	kantor		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 bulan	65.000.000,00			-	-	kantor	-	70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	15.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	kantor		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	kantor		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	167.110.400,00			-	-	-	-	70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 bulan Laporan	167.110.400,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Tingkat partisipasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk</i>	-			100 %	929.453.590,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan penduduk tumbuh seimbang]	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Laju Pertumbuhan Penduduk TFR (Angka Kelahiran Total)	1.11 19.5-1000 20-100 2.28	1.39 20-100 20.6-1000 2.37	1.30 20-100 20.4-1000 2.35	1.28 20-100 20.43-1000 2.32 2.34	929.453.590,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kegiatan Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Ka/Kota dalam rangka Pengendalian Penduduk Jumlah Kegiatan Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Ka/Kota dalam rangka Pengendalian Penduduk	-			1 kegiatan 7 buah	80.003.500,00			-	-	masyarakat	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				5 Satuan Pendidikan	80.003.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota Kependudukan	-			2 keg	849.450.090,00			-	-	masyarakat	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				12 Laporan	849.450.090,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	-	-	-	-	-	929.453.590,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellalui Sistem Informasi Keluarga				1 Dokumen	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				2 Unit	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rata-rata Jumlah anak per keluarga	-			2.70 %	8.235.615.819,00						-	7.720.000.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-			1 keg	7.989.888.394,00			-	-	akseptor KB	-	6.240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	225.400.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	akseptor KB		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Laporan	5.352.170.542,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	akseptor KB		6.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	akseptor KB		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	-			1 keg 1 tahun	88.053.425,00			-	-	faskes	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				39 faskes Laporan	24.671.125,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	faskes		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				25 kecamatan Laporan	63.382.300,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	faskes		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	JJumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-			3 keg	157.674.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	organisasi kemasyarakatan	-	280.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				77 Kampung	157.674.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	organisasi kemasyarakatan		280.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase PPKS kecamatan	-			100 %	2.262.344.175,00						-	250.000.000,00	
		[Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga]	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	100	100	100	100	2.262.344.175,00	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-			1 keg	2.262.344.175,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	keluarga	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL														
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia				3 Kegiatan	276.417.200,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	keluarga		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				25 Laporan / Dokumen	40.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	keluarga		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	276.211.400,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	keluarga		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				12 bulan Orang	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	keluarga		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				60 Orang	24.083.700,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	keluarga		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	-	-	-	-	-	2.262.344.175,00	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	keluarga		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		[Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga]	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	100	100	100	100	2.262.344.175,00	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				1733 Orang	1.615.631.875,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	keluarga		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	-	-	-	-	-	2.262.344.175,00	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				2 Kelompok	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	keluarga		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X	NON URUSAN						2.333.296.686,00							1.120.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.333.296.686,00							1.120.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	2.333.296.686,00						-	1.120.000.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	0,00			-	-	kantor	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 bulan Dokumen	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	kantor		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	395.000.000,00			-	-	-	-	245.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	40.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 bulan Laporan	300.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			1 tahun	465.816.000,00			-	-	kantor	-	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	kantor		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	kantor		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	415.816.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN INTERVENSI STUNTING	-	-	kantor		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	1.182.420.686,00			-	-	kantor	-	450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 bulan Laporan	20.002.436,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	kantor		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 bulan Laporan	1.162.418.250,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	kantor		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 bulan	290.060.000,00			-	-	kantor	-	275.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	73.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	kantor		45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				43 Unit	110.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	kantor		130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	61.600.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	kantor		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	45.460.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	kantor		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	J U M L A H							20.567.700.000,00							15.060.000.000,00		